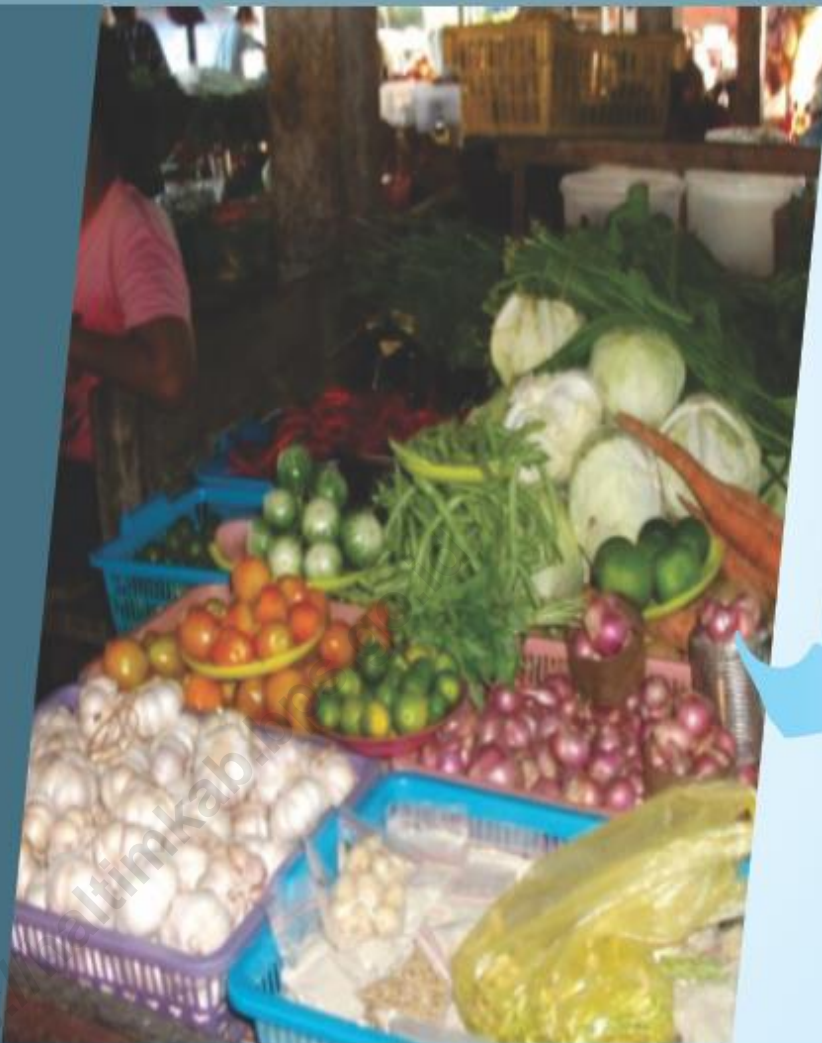


Katalog : 9302020.8206

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MENURUT PENGELUARAN

2013 - 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MENURUT PENGELUARAN

2013 - 2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MENURUT PENGELUARAN  
2013-2017**

Katalog : 9302020.8206  
No. Publikasi : 82060.1814  
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : viii + 68 Halaman

Naskah :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur

Gambar kulit :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur

Diterbitkan oleh :  
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur

Dicetak oleh :

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan tujuan komersial tanpa  
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

## **TIM PENYUSUN**

PUBLIKASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL KABUPATEN HALMAHERA  
TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2013-2017

### **Pengarah:**

Ahmad Abdurrahman

### **Editor:**

Indra Tri Mahardika  
Galuh Sekartadji

### **Penulis:**

Indra Tri Mahardika  
Galuh Sekartadji

### **Desain Cover:**

Dian Ratna Wijaya

## KATA PENGANTAR

Publikasi PDRB Kabupaten Halmahera Timur Menurut Pengeluaran yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Timur memberikan gambaran umum mengenai perekonomian Halmahera Timur terutama tentang perkembangan struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Publikasi ini dibuat berdasarkan berbagai data baik bersumber dari BPS sendiri maupun dari luar BPS

Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Halmahera Timur secara deskriptif. Dalam publikasi ini juga menampilkan data PDRB menurut pengeluaran tahun 2013–2017 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010, baik dalam bentuk nilai nominal maupun persentase. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu berbagai kalangan pengguna data dalam memahami PDRB.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi memberikan dukungan sehingga terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan publikasi ini mendatang.

Kota Maba, Agustus 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Halmahera Timur



Ahmad Abdurrahman, S.ST

# DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2    KEGUNAAN STATISTIK PDRB.....	4
<b>BAB II.....</b>	<b>7</b>
<b>METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....</b>	<b>7</b>
2.1    PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA.....	9
2.2    PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT.....	12
2.3    PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.....	15
2.4    PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	17
2.5    PERUBAHAN INVENTORI.....	22
2.6    EKSPOR DAN IMPOR.....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>29</b>
<b>TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2012–2016.....</b>	<b>29</b>
3.1    TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MENURUT PENGELUARAN .....	31
3.2    PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA.....	35
3.3    PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT.....	37
3.4    PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.....	38
3.5    PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO.....	40
3.6    PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI.....	40
3.7    PERKEMBANGAN EKSPOR.....	41
3.8    PERKEMBANGAN IMPOR.....	42
<b>BAB IV.....</b>	<b>45</b>
<b>PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2011–2015.....</b>	<b>45</b>
4.1    PDRB (NOMINAL).....	47
4.2    PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR TERHADAP EKSPOR.....	48
4.3    PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB.....	49
4.4    PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	50
4.5    PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB.....	50
4.6    PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR.....	51
4.7    KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN.....	52
4.8    INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR).....	53
<b>BAB V.....</b>	<b>55</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

	HALAMAN
TABEL 3.1.1 PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017 (MILIAR RUPIAH).....	31
TABEL 3.1.2 PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017 (MILIAR RUPIAH).....	32
TABEL 3.1.3 DISTRIBUSI PDRB ADHB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017 (PERSEN).....	33
TABEL 3.1.4 PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017 (PERSEN).....	34
TABEL 3.1.5 INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017 (PERSEN).....	35
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	36
TABEL 3.3 PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	37
TABEL 3.4 PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	38
TABEL 3.5 PERKEMBANGAN DAN STRUKTUR PMTB KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	40
TABEL 3.6 PERKEMBANGAN DAN STRUKTUR PERUBAHAN INVENTORI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	41
TABEL 3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR ANTAR DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	42
TABEL 3.8 PERKEMBANGAN IMPOR ANTAR DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013–2017.....	43
TABEL 4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	47
TABEL 4.2 PERBANDINGAN PDRB PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR, 2013–2017.....	48
TABEL 4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB, 2013–2017.....	49
TABEL 4.4 PROPORSI TOTAL PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	50
TABEL 4.5 RASIO EKSPOR TERHADAP PMTB (ADHB) KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	51
TABEL 4.6 RASIO PDRB TERHADAP IMPOR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013–2017.....	51
TABEL 4.7 SISI KESEIMBANGAN PENYEDIAAN DAN PERMINTAAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013–2017.....	52
TABEL 4.8. ICOR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2015-2017.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 3. PERBANDINGAN PDRB ADH BERLAKU DAN ADH KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR , 2013– 2017.....	33
---	----

<https://haltimkab.bps.go.id>



## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

TABEL 1.PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (JUTA RUPIAH), 2013-2017.....	61
TABEL 2.PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (JUTA RUPIAH), 2013-2017.....	61
TABEL 3. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (PERSEN), 2013-2017.....	62
TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (PERSEN), 2013- 2017.....	62
TABEL 5.INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 2013-2017.....	63
TABEL 6.LAJU INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (PERSEN), 2013-2017.....	63
TABEL 7.SUMBER PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (PERSEN), 2013-2017.....	64

<https://halminkab.bps.go.id>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi serta pergeserannya. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode berikutnya (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

### a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu provinsi/kabupaten dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. *Real Estate*, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa

Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

**b. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

**c. Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

## **1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB**

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://halmimkab.bps.go.id>

**BAB II**  
**METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA**

<https://haltimka.bps.go.id>





## **2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA**

### **i. Pendahuluan**

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

### **ii. Konsep dan definisi**

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### **iii. Cakupan**

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*); Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

#### iv. Penghitungan PKRT Tahunan

##### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

##### 2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010,

diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
  - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
  - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator *supply* komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT adh berlaku tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

## **2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT**

### **i Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### **ii Konsep dan definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

#### iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

##### 1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.  
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

##### 2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$x_{ij}$  : PK-LNPRT hasil survey menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

$i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

$j$  : Jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$X$  : PK-LNPRT adh berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga

berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## **2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH**

### **i. Pendahuluan**

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/daerah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

### **ii. Konsep dan Definisi**

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan



sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

### **iii. Cakupan**

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

### **iv. Penghitungan PK-P Tahunan**

#### **1. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

#### **2. Metode Penghitungan**

#### a. PK-P Kabupaten adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan.

#### b. PK-P Kabupaten adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

### 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

#### i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang

dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

## ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

## iii Cakupan

### **PMTB terdiri dari:**

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi

dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

#### iv **Penghitungan PMTB Tahunan**

##### **1. Sumber data**

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat. (level provinsi)
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

##### **2. Metode penghitungan**

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi

barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

### **Pendekatan Langsung**

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### **Pendekatan Tidak Langsung**

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output

mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## **2.5 PERUBAHAN INVENTORI**

### **i Pendahuluan**

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode

tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

## **ii Konsep dan definisi**

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

## **iii Cakupan**

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;



- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### **iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan**

##### **1. Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan

ternak dari Ditjennak Kementan.

## 2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### ***Pendekatan Langsung***

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

### ***Pendekatan Tidak Langsung***

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga

yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

## **2.6 EKSPOR DAN IMPOR**

### **i Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### **ii Konsep dan definisi**

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan

ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

### **iii Cakupan**

Ekspor-Impor pada suatu kabupaten terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut  
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
  - Ekspor antar daerah
  - Impor antar daerah

### **iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan**

#### **1. Sumber data**

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI (level provinsi);
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang (level provinsi);
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

#### **2. Metode Penghitungan**

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli

rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://halmimkab.bps.go.id>

**BAB III**  
**TINJAUAN PEREKONOMIAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**BERDASARKAN PDRB MENURUT**  
**PENGELUARAN TAHUN 2013–2017**

<https://halmahera.go.id>



Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Halmahera Timur akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan antar daerah.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Halmahera Timur digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir baik rumah tangga, lembaga non profit, maupun pemerintah. Sebagian lainnya digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

### 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan tanda perkembangan, walaupun kinerja net ekspor masih belum berkembang seperti tiga tahun lalu tahun 2013. setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang cenderung meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 3.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur, 2013–2017 (Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	783,66	883,44	984,61	1.107,91	1.281,58
2. Konsumsi LNPRT	35,72	41,25	46,01	48,97	53,31
3. Konsumsi Pemerintah	514,31	589,06	689,35	785,86	876,15
4. PMTB	742,28	854,31	974,44	1.103,00	1.339,54
5. Perubahan Inventori	(39,35)	19,36	84,33	(6,06)	(46,58)
6. Ekspor Antar Daerah	2.206,19	1.978,87	1.889,40	2.070,60	2.420,68
7. Impor Antar Daerah	2.036,24	2.254,56	2.351,26	2.598,30	3.157,15
<b>PDRB</b>	<b>2.206,57</b>	<b>2.111,73</b>	<b>2.316,88</b>	<b>2.511,97</b>	<b>2.767,51</b>

Keterangan \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



Nilai PDRB Kabupaten Halmahera Timur atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2014. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan yang cukup tinggi karena menurunnya nilai net ekspor Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tahun 2015-2017, hampir seluruh komponen pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014.

**Tabel 3.1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur, 2013–2017 (Miliar Rupiah)**

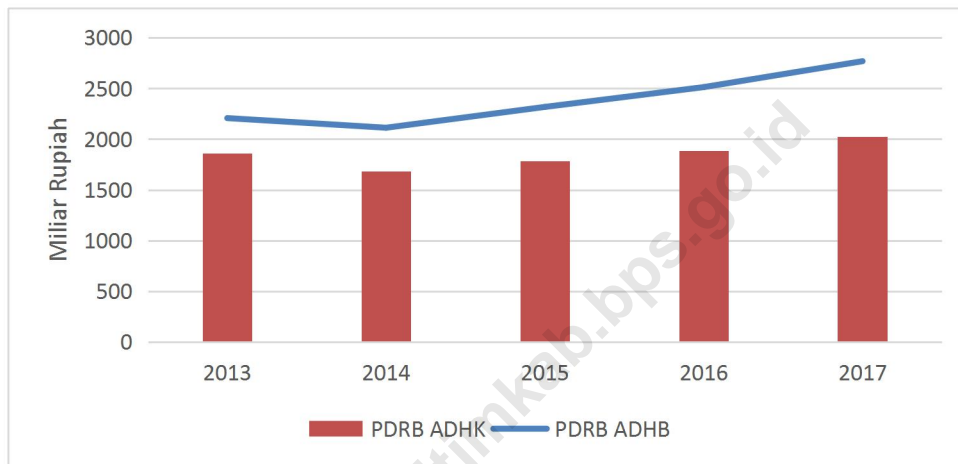
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	697,77	744,60	794,92	856,15	947,67
2. Konsumsi LNPR	31,36	34,52	36,02	37,21	39,02
3. Konsumsi Pemerintah	413,64	448,93	480,19	508,61	540,11
4. PMTB	694,74	742,68	791,13	859,67	973,09
5. Perubahan Inventori	(85,13)	14,16	83,78	(5,06)	(32,82)
6. Ekspor Antar Daerah	1.630,25	1.362,50	1.436,62	1.554,00	1.736,19
7. Impor Antar Daerah	1.520,65	1.665,30	1.837,77	1.927,43	2.181,07
<b>PDRB</b>	<b>1.861,98</b>	<b>1.682,08</b>	<b>1.784,90</b>	<b>1.883,15</b>	<b>2.022,20</b>

Keterangan \* Angka Sementara  
\*\* Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 yang artinya berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013 s.d 2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 3.1.2 di atas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017, kecuali komponen perubahan inventori dan ekspor. Perubahan inventori cenderung fluktuatif, sedangkan ekspor mulai menurun tahun 2014 dan akhirnya sedikit meningkat pada tahun 2015.

Gambar 1 memaparkan perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010. Berdasarkan gambar 1 tersebut, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

**Gambar 3 Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur , 2013– 2017**



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), Net Ekspor (NE) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3.1.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur, 2013–2017 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	35,51	41,83	42,50	44,11	46,31
2. Konsumsi LNPRT	1,62	1,95	1,99	1,95	1,93
3. Konsumsi Pemerintah	23,31	27,89	29,75	31,28	31,66
4. PMTB	33,64	40,46	42,06	43,91	48,40
5. Perubahan Inventori	(1,78)	0,92	3,64	(0,24)	(1,68)
6. Ekspor Antar Daerah	99,98	93,71	81,55	82,43	87,47
7. Impor Antar Daerah	92,28	106,76	101,48	103,44	114,08
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.1.3 di atas terlihat bahwa selama periode 2013–2017, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga dimana barang dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar berasal dari daerah luar Kabupaten Halmahera Timur. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 20–31 persen dan selalu meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar dan terus meningkat.

Pengeluaran untuk investasi fisik juga relatif besar selama lima tahun terakhir hal ini bisa dilihat pada tabel 3.1.3 dimana proporsi investasi fisik (PMTB dan Perubahan Inventori) berada di kisaran 33 - 48 persen dan proporsinya cenderung meningkat setiap tahun. Manfaat jangka panjang dari peningkatan pengeluaran investasi ini yaitu mampu mengurangi ketimpangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.

**Tabel 3.1.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur, 2013–2017 (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,78	6,71	6,76	7,70	10,69
2. Konsumsi LNPRT	6,14	10,08	4,35	3,30	4,88
3. Konsumsi Pemerintah	5,76	8,53	6,97	5,92	6,19
4. PMTB	5,77	6,90	6,52	8,66	13,19
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Antar Daerah	11,60	(16,42)	5,44	8,17	11,72
7. Impor Antar Daerah	(1,33)	9,51	10,36	4,88	13,16
<b>PDRB</b>	<b>5,83</b>	<b>(9,66)</b>	<b>6,11</b>	<b>5,50</b>	<b>7,38</b>

Keterangan \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur dari tahun 2013 s.d 2017 mengalami kecenderungan yang positif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017 dengan 7,38 persen sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2014 dengan pertumbuhan minus 9,66 persen. Pertumbuhan yang minus sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekspor antar daerah Kabupaten Halmahera Timur. Ekspor antar daerah yang menurun salah satunya diduga

akibat menurunnya volume ekspor barang tambang nikel.

Indeks implisit<sup>1</sup> PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), indeks ini menunjukkan peningkatan setiap tahun (tabel 3.1.5). Jika dilihat kenaikan setiap tahun, laju indeks implisit tertinggi terjadi di tahun 2014 dengan 5,94 persen sedangkan pada tahun 2017 laju kenaikan harga menyentuh angka 2,6 persen.

**Tabel 3.1.5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur, 2013–2017 (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	112,31	118,65	123,86	129,41	135,23
2. Konsumsi LNPRT	113,93	119,50	127,72	131,60	136,60
3. Konsumsi Pemerintah	124,34	131,22	143,56	154,51	162,22
4. PMTB	106,84	115,03	123,17	128,30	137,66
5. Perubahan Inventori	46,22	136,68	100,66	119,85	141,94
6. Ekspor Antar Daerah	135,33	145,24	131,52	133,24	139,42
7. Impor Antar Daerah	133,91	135,38	127,94	134,81	144,75
<b>PDRB</b>	118,51	125,54	129,80	133,39	136,86

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Berdasarkan tabel 3.2, dalam kurun waktu 2012–2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Timur. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 hingga tahun 2016 selalu meningkat. Distribusi komponen ini berada pada kisaran 35 hingga 43 persen. Tingginya persentase komponen konsumsi rumah tangga dipicu oleh penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik termasuk yang berasal dari impor. Secara umum rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

<sup>1</sup> Indeks perkembangan

Pada tahun 2010, rata-rata setiap penduduk Kabupaten Halmahera Timur menghabiskan dana 7,97 juta rupiah untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (baik sandang, perumahan, pendidikan dsb). Pengeluaran tersebut terus meningkat menjadi 12,63 juta pada tahun 2016. Sama halnya dengan konsumsi yang dikeluarkan setiap rumah tangga penduduk, setiap tahun konsumsi yang dihabiskan oleh setiap rumah tangga selalu meningkat dimana pada tahun 2010 rata-rata setiap rumah tangga mengeluarkan dana sebanyak 36,89 juta rupiah untuk konsumsi makanan dan bukan makanan lalu meningkat menjadi 58,5 juta rupiah pada tahun 2016. Peningkatan setiap tahun berada pada rentang 3,45 s.d. 4,42 persen.

**Tabel 3.2 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Timur, 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	783,66	883,44	984,61	1.107,91	1.281,58
b. ADHK 2010	697,77	744,60	794,92	856,15	947,67
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	35,51	41,83	42,50	44,11	46,31
Rata-rata konsumsi per-Kapita /tahun (Juta Rp)					
a.ADHB	9,73	10,66	11,56	12,64	14,23
b.ADHK 2010	8,66	8,98	9,33	9,76	10,52
Rata-rata konsumsi per – Rumah Tangga/tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	45,04	49,31	53,53	58,51	65,89
b. ADHK 2010	40,10	41,56	43,21	45,22	48,72
Pertumbuhan <sup>2</sup> (Persen)					
a. Total Konsumsi RT	5,78	6,71	6,76	7,70	10,69
b. Per-RT	2,60	3,64	3,98	4,64	7,75
c. Perkapita (konstan 2010)	2,60	3,64	3,98	4,64	7,75
Jumlah RT(unit)	17.401	17.916	18.395	18.934	19.450
Jumlah penduduk (000 org)	80,53	82,91	85,18	87,68	90,07

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sementara itu, jika dilihat atas dasar harga konstan, konsumsi rumah tangga dan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi penduduk Kabupaten Halmahera Timur (baik secara umum

<sup>2</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

maupun secara rata-rata per penduduk) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 konsumsi rumah tangga meningkat 10,69 persen, sementara apabila dihitung konsumsi rata-rata setiap penduduk, maka peningkatannya 10,52 persen. Peningkatan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 dimana lajunya mencapai 10,69 persen dengan peningkatan konsumsi rata-rata setiap penduduk 10,52 persen.

### 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan. Data berikut menunjukkan besarnya proporsi komponen pengeluaran konsumsi LNPRT terhadap PDRB.

**Tabel 3.3 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Halmahera Timur , 2013–2017**

<b>U r a i a n</b>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	35,72	41,25	46,01	48,97	53,31
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	31,36	34,52	36,02	37,21	39,02
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,62	1,95	1,98	1,94	1,93
Laju Pertumbuhan Riil Konsumsi LNPRT ( <i>persen</i> )	6,1	10,1	4,3	3,3	4,5

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Konsumsi LNPRT mempunyai peranan yang relatif kecil terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Timur sekitar 1 s.d 2 persen. Namun secara nominal, konsumsi LNPRT selalu meningkat tiap tahun dimana pada tahun 2010 LNPRT mengeluarkan konsumsi sebesar 26,8 miliar lalu meningkat menjadi 53,31 miliar pada tahun 2017.

Pertumbuhan konsumsi LNPRT selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif positif dimana laju konsumsi tertinggi terjadi pada tahun 2014 diduga tingginya laju akibat adanya penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung. Sedangkan laju konsumsi terendah terjadi pada tahun 2016 dengan laju yang terjadi sebesar 3,3 persen.

### 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Halmahera Timur serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan tiap tahun, baik untuk atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kenaikan secara nominal bisa dilihat pada konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sebesar 325,83 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 785,86 miliar rupiah. Jika dilihat kenaikan secara riil, konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2010 menyentuh angka 325,83 miliar rupiah dan meningkat menjadi 508,61 miliar rupiah pada tahun 2016 (perhatikan tabel 3.4).

**Tabel 3.4 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, 2013–2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	514,31	589,06	689,35	785,86	876,15
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	418,64	448,93	480,19	508,61	540,11
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	23,31	27,89	29,69	31,12	31,66
Konsumsi Pemerintah per-kapita ( <i>Juta Rp</i> )					
a. ADHB	6,4	7,1	8,1	9	9,7
b. ADHK 2010	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0
Konsumsi Pemerintah per-pegawai ( <i>Juta Rp</i> )					
a. ADHB	188,67	195,96	228,49	283,60	316,53
b. ADHK 2010	153,57	149,34	159,16	183,55	195,13
Pertumbuhan <sup>3</sup> ( <i>Persen</i> )					
a. Total konsumsi pemerintah	5,76	8,53	6,97	5,92	6,19
b. Konsumsi per-kapita	2,58	5,42	4,11	2,90	3,38
c. Konsumsi per-pegawai	4,72	-2,75	6,57	15,32	6,31
Jumlah penduduk ( <i>000 orang</i> )	80,53	82,91	85,18	87,68	90,07
Jumlah Pegawai ( <i>orang</i> )	2726	3006	3017	2771	2768

Keterangan : \* Angka Sementara & \*\* Angka Sangat Sementara

<sup>3</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuatif, dari 23,31 persen di tahun 2013 lalu meningkat menjadi 31,66 persen pada tahun 2017. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Terlihat dalam tabel 3.4, pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku mencapai 4,4 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2017, rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita menyentuh angka 9,7 juta rupiah.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 3.4). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang selalu positif walaupun pertumbuhannya ada yang cepat dan ada yang relatif lambat. Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah per-kapita yang cepat terjadi pada tahun 2014 dengan 8,53 persen. Sedangkan pada tahun 2017 konsumsi akhir pemerintah per-kapita tumbuh 6,19 persen.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-pegawai atas dasar harga konstan dan harga berlaku menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat walaupun sedikit berbeda pada tahun 2014. Konsumsi pemerintah per-pegawai atas dasar berlaku pada tahun 2013 sebesar 188,67 juta rupiah meningkat menjadi 316,53 juta rupiah pada tahun 2017. Jika dicermati dari pertumbuhannya, konsumsi pemerintah per-pegawai tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tumbuh 15,32 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per penduduk. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.



### 3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik), atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>4</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada tabel 3.5 di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013–2017 sangat bervariasi tiap tahunnya.

**Tabel 3.5 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Halmahera Timur, 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	742,28	854,31	974,44	1.103,00	1.339,54
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	694,74	742,68	791,13	859,67	973,09
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	33,64	40,46	41,97	42,79	48,40
Pertumbuhan <sup>8</sup>					
PMTB	5,77	6,90	6,52	8,66	13,19

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

<sup>4</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Berdasarkan tabel 3.6, peranan perubahan nilai inventori terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur cenderung fluktuatif setiap tahunnya yaitu sebesar 6,75 persen di tahun 2010 lalu mengalami perkembangan positif dan negatif pada tahun setelahnya.

**Tabel 3.6 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Halmahera Timur, 2013–2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Perubahan Inventori					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	-39,35	19,36	84,33	-6,06	-46,58
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	-85,13	14,16	83,78	-5,06	-32,82
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-1,78	0,92	3,63	-0,24	-1,68

Keterangan : \*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

### 3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri/wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Produk ekspor yang berasal dari Kabupaten Halmahera Timur antara lain barang tambang nikel, beras, cabai, dan tomat serta beberapa buah-buahan.

**Tabel 3.7 Perkembangan Ekspor Antar Daerah Kabupaten Halmahera Timur, 2013–2017**

<b>U r a i a n</b>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	2.206,19	1.978,87	1.889,40	2.070,60	2.420,68
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	1.630,25	1.362,50	1.436,62	1.553,99	1.736,19
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	99,98	93,71	81,39	82,43	87,47
Pertumbuhan <sup>5</sup>					
Total Ekspor	11,60	-16,42	5,44	8,17	11,72

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Peningkatan nilai ekspor terjadi dari tahun 2013–2017 kecuali pada tahun 2014 (perhatikan tabel 3.7). Kenaikan secara nominal diikuti dengan kenaikan secara riil (kenaikan nilai ekspor atas dasar harga konstan). Selama lima tahun terakhir nilai ekspor cenderung tumbuh positif kecuali pada tahun 2014, ekspor Kabupaten Halmahera Timur mengalami pertumbuhan yang negatif dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan negatif tahun 2014 diduga karena menurunnya penjualan barang tambang nikel akibat kebijakan UU Minerba dalam hal pembatasan ekspor luar negeri mineral mentah. Kinerja ekspor paling baik terjadi pada tahun 2017 dimana pertumbuhannya mencapai 11,72 persen, diharapkan di tahun mendatang kinerja ekspor bisa lebih baik.

### 3.8 PERKEMBANGAN IMPOR

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Halmahera Timur, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen/luar wilayah. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

<sup>5</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kabupaten Halmahera Timur terhadap ekonomi atau produk daerah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Halmahera Timur di luar daerah, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Barang dan jasa yang diimpor dari luar daerah adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan bakar minyak, produk makanan dan minuman olahan, produk pakaian, dan produk untuk kehidupan sehari-hari

**Tabel 3.8 Perkembangan Impor Antar Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2013–2017**

<b>U r a i a n</b>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	2.036,24	2.254,56	2.351,26	2.598,30	3.157,15
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	1.520,65	1.665,30	1.837,77	1.927,43	2.181,07
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	92,28	106,76	101,10	103,44	114,08
Pertumbuhan <sup>6</sup>					
Total Impor	-1,33	9,51	10,36	4,88	13,16

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor antar daerah Kabupaten Halmahera Timur cenderung meningkat. Selama periode tahun 2013 s.d 2017, baik impor atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, nilai impor mengalami perkembangan yang selalu meningkat, kecuali pada tahun 2013. Berdasarkan nilai impor atas dasar harga berlaku, proporsinya terhadap PDRB di atas 92 persen.(Perhatikan Tabel 3.8)

Produk impor di Kabupaten Halmahera Timur jika dilihat proporsinya nilainya melebihi total PDRB Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2014-2017, hal ini mengindikasikan bahwa barang impor antar daerah sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi penduduk Kabupaten Halmahera Timur.

<sup>6</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

<https://halmimkab.bps.go.id>

**BAB IV**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB**  
**MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN**  
**HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013–2017**

<https://haltimtimor.go.id>



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB menurut pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Halmahera Timur, 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB ( <i>Miliar Rp</i> )					
- ADHB	2.206,57	2.111,73	2.316,88	2.511,97	2.767,51
- ADHK 2010	1.861,98	1.682,08	1.784,90	1.883,15	2.022,20
PDRB perkapita ( <i>Juta Rp</i> )					
- ADHB	28,25	26,22	27,94	29,49	31,56
- ADHK 2010	23,12	20,29	20,95	21,48	22,45
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK	2,65	-12,25	3,28	2,50	4,53
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	80,53	82,91	85,18	87,68	90,07

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 4.1, PDRB per-kepita Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat walaupun sedikit berbeda dengan kenaikan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Halmahera



Timur rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Selama tujuh tahun terakhir rata-rata setiap penduduk mampu menciptakan nilai tambah ekonomi diatas 20 juta baik untuk PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Timur merupakan tertinggi ketiga diantara kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Bahkan PDRB per kapita Halmahera Timur selalu lebih tinggi daripada PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara. Nilai tambah ekonomi perkapita Kabupaten Halmahera Timur tertinggi terjadi pada tahun 2013 dimana mampu mencapai 23,12 juta rupiah untuk PDRB atas dasar harga konstan dan pada tahun 2017 mencapai 31,56 juta rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku.

#### 4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi oleh Rumah Tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor ke luar wilayah tersebut. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam pengeluaran PDRB Kabupaten Halmahera Timur (sekitar 36 hingga 46 persen berdasarkan tabel 4.2), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Meskipun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2013—2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	783,66	883,44	984,61	1.107,91	1.281,58
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	2.206,19	1.978,87	1.889,40	2.070,60	2.420,68
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,36	0,42	0,42	0,44	0,46
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor (%)	36	42	42	44	46

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Data pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga 0,36 kali dari produk yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian penyediaan (*supply*) domestik yang diserap/dikonsumsi penduduk digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Komoditas ekspor Kabupaten Halmahera Timur yang bersumber dari penyediaan daerah, salah satu yang terbesar adalah produk hasil tambang nikel. Produk nikel bukan merupakan produk konsumsi rumah tangga Halmahera Timur. Hal inilah yang menyebabkan rasio konsumsi akhir rumah tangga terhadap nilai ekspor cenderung kecil (kurang dari 1). Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan rasio yang cukup signifikan mulai dari 0,36 pada tahun 2013 hingga 0,46 pada tahun 2017.

#### 4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Halmahera Timur untuk konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi yang relatif hampir sama dengan PMTB.

**Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT(ADHB) (Miliar Rp)	783,66	883,44	984,61	1.107,91	1.281,58
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	742,28	854,31	974,44	1.103,00	1.339,54
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,06	1,03	1,01	1,00	0,96

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB paling rendah terjadi pada tahun 2017 dan rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013

#### 4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi memiliki kesamaan dalam hal belanja sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 4.4 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur, 2013—2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	783,66	883,44	984,61	1.107,91	1.281,58
b. LNPRT	35,72	41,25	46,01	48,97	53,31
c. Pemerintah	514,31	589,06	689,35	785,86	876,15
J u m l a h	1.333,69	1.513,75	1.719,96	1.942,73	2.211,03
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.206,57	2.111,73	2.316,88	2.511,97	2.767,51
Proporsi	60,44	71,68	74,24	77,34	79,90

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sebagian besar produk yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 50 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya bahkan pada tahun 2017 mencapai 76,91 persen dari total PDRB.

#### 4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (investasi/PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Dapat dilihat pada tabel 4.5, pada tahun 2010 s.d 2016 ekspor

mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio ekspor terhadap PMTB di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

**Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Kabupaten Halmahera Timur, 2013—2017**

Uraian (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017** (6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	2.206,19	1.978,87	1.889,40	2.070,60	2.420,68
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	742,28	854,31	974,44	1.103,00	1.338,54
Rasio Ekspor Terhadap PMTB	2,97	2,32	1,94	1,88	1,81

Keterangan : \*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

#### 4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh luar daerah. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 4.6 Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2013–2017**

Uraian (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017** (6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.206,57	2.111,73	2.316,88	2.511,97	2.767,51
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	2.036,24	2.254,56	2.351,26	2.598,31	3.157,15
Rasio PDRB terhadap Impor	1,08	0,94	0,99	0,97	0,88

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 4.6, rasio PDRB terhadap impor tahun 2013 s.d 2017 cenderung fluktuatif. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 1,08 sedangkan nilai rasio pada tahun lainnya di bawah 1. Pada tahun 2014 s.d 2017, Kabupaten Halmahera Timur memiliki ketergantungan terhadap impor lebih tinggi dibanding tahun 2013.

#### 4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*). Berdasarkan tabel 4.7 di bawah ini terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah atau luar negeri (di atas 40 persen.) Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru dipenuhi sekitar 46 s.d 52 persen dari selisih hasil produksi. Dalam kurun waktu 2013–2017, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 4.242,81 miliar rupiah (2013) menjadi sebesar 5.924,66 miliar rupiah (2017).

**Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Halmahera Timur, 2013–2017**

Uraian (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017** (6)
<b>Total Penyediaan</b>					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.206,57	2.111,73	2.316,88	2.511,98	2.767,51
%	52,01	48,36	49,63	49,16	46,71
<b>Total Nilai Impor (ADHB)</b>					
(Miliar Rp)	2.036,24	2.254,56	2.351,26	2.598,30	3.157,15
%	47,99	51,64	50,37	50,84	53,29
<b>Total Permintaan Akhir)*</b>					
(Miliar Rp)	4.242,81	4.366,29	4.668,14	5.110,28	5.924,66
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : ) \*termasuk diskrepansi statistik

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

#### 4.8 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

$I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = Output tahun ke t

$Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

**Tabel 4.8. ICOR Kabupaten Halmahera Timur 2015-2017**

Uraian	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	1.784,90	1.883,15	2.022,20
Perubahan PDRB $\Delta PDRB$ (Miliar Rp)	102,82	98,25	139,05
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	791,13	859,67	973,09
ICOR	7,69	8,75	7,00

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Data pada tabel 4.8 di atas menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Halmahera Timur cenderung mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir, yaitu dari sebesar 7,69 (2015) menjadi 8,64 (2016). Interpretasi angka ini adalah dibutuhkan investasi fisik/PMTB 8,64 miliar agar penambahan output meningkat 1 miliar.

<https://halmahera.bps.go.id>

<https://halmimkab.bps.go.id>

## **BAB V PENUTUP**



<https://halmimkab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d. 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Timur. Analisis ekonomi dari sisi PDRB menurut pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB menurut pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d. 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing- masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposabel*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara

agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur terhadap ekonomi daerah lain (*rest of the world*).

<https://halmakab.bps.go.id>

<https://halmimkab.bps.go.id>

## **LAMPIRAN**



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur (Juta Rupiah), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	783.657,11	883.435,43	984.607,23	1.107.906,27	1.281.576,36
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	35.723,91	41.250,38	46.005,24	48.965,52	53.306,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	514.310,76	589.059,12	689.350,85	785.859,97	876.145,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	742.277,62	854.313,53	974.435,86	1.103.004,16	1.339.535,27
5. Perubahan Inventori	-39.350,74	19.356,72	84.334,93	(6.063,60)	(46.584,75)
6. Ekspor Luar Negeri					
7. Impor Luar Negeri					
8.a. Ekspor	2.206.188,83	1.978.873,31	1.889.397,24	2.070.603,83	2.420.683,49
8.b. Impor	2.036.242,44	2.254.557,95	2.351.256,02	2.598.304,42	3.157.151,94
PDRB	2.206.565,05	2.111.730,54	2.316.875,33	2.511.971,73	2.767.510,41

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur (Juta Rupiah), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	697.768,98	744.596,91	794.923,82	856.151,27	947.672,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	31.356,05	34.517,92	36.019,21	37.207,84	39.024,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	413.639,04	448.926,13	480.194,73	508.610,13	540.111,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	694.737,06	742.682,61	791.132,21	859.674,36	973.092,61
5. Perubahan Inventori	-85.132,46	14.162,44	83.784,17	(5.059,21)	(32.820,76)
6. Ekspor Luar Negeri					
7. Impor Luar Negeri					
8.a. Ekspor	1.630.254,28	1.362.501,04	1.436.615,97	1.553.998,05	1.736.191,64
8.b. Impor	1.520.647,52	1.665.302,32	1.837.773,83	1.927.429,73	2.181.067,17
PDRB	1.861.975,42	1.682.084,74	1.784.896,27	1.883.152,71	2.022.204,55

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur (Persen), 2013-2017

Komponen Pengeluaran (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	35,51	41,83	42,50	44,11	46,31
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,62	1,95	1,99	1,95	1,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23,31	27,89	29,75	31,28	31,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,64	40,46	42,06	43,91	48,40
5. Perubahan Inventori	-1,78	0,92	3,64	(0,24)	(1,68)
6. Ekspor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Impor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.a. Ekspor	99,98	93,71	81,55	82,43	87,47
8.b. Impor	92,28	106,76	101,48	103,44	114,08
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur (Persen), 2013-2017

Komponen Pengeluaran (1)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016* (6)	2017** (7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,78	6,71	6,76	7,70	10,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,14	10,08	4,35	3,30	4,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,76	8,53	6,97	5,92	6,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,77	6,90	6,52	8,66	13,19
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri					
7. Impor Luar Negeri					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)					
8.a. Ekspor	11,60	(16,42)	5,44	8,17	11,72
8.b. Impor	(1,33)	9,51	10,36	4,88	13,16
PDRB	5,83	(9,66)	6,11	5,50	7,38

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur, 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	112,31	118,65	123,86	129,41	135,23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	113,93	119,50	127,72	131,60	136,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	124,34	131,22	143,56	154,51	162,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	106,84	115,03	123,17	128,30	137,66
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri					
7. Impor Luar Negeri					
8.a. Ekspor	135,33	145,24	131,52	133,24	139,42
8.b. Impor	133,91	135,38	127,94	134,81	144,75
PDRB	118,51	125,54	129,80	133,39	136,86

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur (Persen), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,86	5,64	4,40	4,48	4,50
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,51	4,89	6,88	3,03	3,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,33	5,53	9,41	7,63	4,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,13	7,66	7,08	4,17	7,29
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri					
7. Impor Luar Negeri					
8.a. Ekspor	(6,09)	7,32	(9,45)	1,31	4,64
8.b. Impor	(3,39)	1,10	(5,50)	5,37	7,38
PDRB	3,99	5,94	3,39	2,76	2,60

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



Tabel 7. Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Timur (Persen), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,17	(2,51)	2,99	3,43	4,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,10	(0,17)	0,09	0,07	0,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,28	(1,90)	1,86	1,59	1,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,15	(2,57)	2,88	3,84	6,02
5. Perubahan Inventori	2,17	(2,51)	2,99	3,43	4,86
6. Ekspor Luar Negeri					
7. Impor Luar Negeri					
8.a. Ekspor	9,63	14,38	4,41	6,58	9,67
8.b. Impor	(1,17)	(7,77)	10,25	5,02	13,47
PDRB	5,83	(9,66)	6,11	5,50	7,38

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

<https://halminkab.bps.go.id>

## **DAFTAR PUSTAKA**



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. \_\_\_\_\_, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. \_\_\_\_\_, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. \_\_\_\_\_, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
11. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev.1, New York, 1973.
17. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies

Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

19. \_\_\_\_\_, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama *Asian Development Bank* dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

<https://haltimkab.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://halmkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Jalan Trans Halmahera, Desa Soagimalaha, Kecamatan  
Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku  
Utara, 97862

Homepage: [halmkab.bps.go.id](http://halmkab.bps.go.id); E-mail: [bps8206@bps.go.id](mailto:bps8206@bps.go.id)